

## PENGUNAAN ISU KONTROVERSIAL DALAM KELAS PKn/ SEJARAH DI ERA REFORMASI

Oleh : Abu Su'ud

### Abstrak

Kendala umum dalam proses pembelajaran sejarah yang dirasakan para siswa/mahasiswa PKN/Sejarah adalah betapa tidak menariknya proses pembelajaran, sementara pelajaran sejarah sebagai bagian pendidikan IPS maupun IPS amat penting dalam upaya menyiapkan warga negara yang baik Dipandang perlu dilakukan penelitian dengan judul Penggunaan Isu Kontroversial dalam Kelas PKN/Sejarah di Era Reformasi.. Rumusan masalahnya adalah 1) Bagaimana kepedulian para pengajar sejarah terhadap isu kontroversial. 2) Bagaimana kecenderungan para pengajar sejarah dalam penggunaan isu kontroversial dalam kelas sejarah. 3) Bagaimana resiko penggunaan isu kontroversial dalam kelas sejarah Untuk hal-hal tsb juga tujuan penelitian ini diselenggarakan. Diharapkan hasil penelitian bisa bermanfaat dalam upaya agar pembelajaran sejarah menjadi lebih menarik dan efektif. Untuk penelitian ini data diambil dari pengajar sejarah Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Undip, FIS Unnes, serta semua SMA Negeri di kota Semarang, dengan cara mengisi kuesioner/ angket. Analisis data dilakukan secara proporsional .

Hasil kajian menunjukkan informasi berikut. Mengenai respon terhadap isu kontroversial bagian terbesar (69%) pengajar sejarah *menaruh perhatian penuh dan mengikuti kelanjutannya*. Mengenai kecenderungan menggunakan isu kontroversial dalam kelas dilakukan karena *topiknya aktual* (34%); *menarik* (34%); *relevan* (30%); dan *sudah terbiasa* (2%). Tentang manfaat penggunaan isu kontroversial dalam kelas dikemukakan karena pembelajaran menjadi *lebih kontekstual* (33%), berpotensi meningkatkan *partisipasi siswa* (19%), pembahasan berpotensi *lebih menarik, tidak jenuh* (17%), berpotensi mengembangkan *semangat toleransi dan saling pengertian* (16%), dan berpotensi *mengembangkan dialog* ( 15%). Mengenai kelemahannya dikatakan karena *bahan ajar tidak selesai dibahas* (29%), *membutuhkan pengajar yang gemar mengikuti dialog terbuka* (24%), *tidak semua warga kelas tertarik* (22%) *memerlukan kesabaran dan kearifan pengajar* (19%).

Kata kunci :pembelajaran sejarah/IPS, isu kontroversial

## Latar Belakang

### Konseptual

Kendala umum dalam proses pembelajaran sejarah yang dirasakan oleh para siswa maupun mahasiswa sejarah adalah betapa tidak menariknya proses pembelajaran sejarah, sementara pelajaran sejarah sebagai bagian dari pendidikan IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) amat penting dalam upaya menyiapkan warga negara yang baik. Dalam setiap kurikulum IPS termasuk bidang studi sejarah yang pernah ada di Indonesia senantiasa dikemukakan betapa bidang studi sejarah merupakan sarana untuk pendidikan kewarganegaraan (PKN) yang efektif. Dalam pada itu tersedia juga sejumlah strategi pembelajaran yang lengkap untuk mencapai tujuan kurikuler, seperti *Strategi Pembelajaran Ekspositorik-Deduktif*. Ekspositorik dapat diartikan menjelaskan atau membeberkan, sedangkan Deduktif berarti proses berpikir dari hal-hal yang umum atau abstrak menuju ke hal-hal yang khusus yang lebih konkrit. Termasuk ke dalam strategi itu adalah Metode Ceramah (*Lecturing*), yang mempunyai kelemahan dalam penampilannya, yang dapat diatasi dengan menggunakan ceramah bervariasi, yaitu ceramah dengan selingan tanya-jawab, diskusi, atau pemberian tugas (Suprayogi, 2007).

Dalam hal sumber bahan ajar pendidikan IPS memiliki sejumlah besar fasilitas, antara lain diambil dari keadaan dan peristiwa sosial di lingkungan kehidupan anak didik dan berbagai peristiwa sosial yang terjadi di lingkungannya merupakan salah satu sumber pengajaran IPS yang sangat tepat (Sudarno WH, 1998). Namun nampaknya para pengajar senantiasa merasa dibatasi target yang tertera dalam silabus, sehingga kurang memiliki kreatifitas dalam memilih jenis strategi lain. Kembali sejarah diajarkan secara monotonik, tanpa variasi, tanpa inovasi.

### Faktual

Penelitian yang pernah dilakukan untuk mengetahui bagaimana kecenderungan para pengajar sejarah dalam memanfaatkan isu kontroversial dengan judul “Bila Isu Kontroversial Masuk Kelas Sejarah”, menunjukkan potret kinerja pengajar sejarah yang tidak menggembirakan dalam memilih strategi pembelajaran, padahal isu-isu itu merupakan kejadian atau peristiwa yang barangkali terjadi di daerahnya. Mereka cenderung mengelak menggunakan isu kontroversial sebagai bentuk strategi pembelajaran. Penelitian itu juga berhasil menemukan strategi pembelajaran itu sebagai salah satu ‘model pembelajaran sejarah’ yang aktual (Abu Su`ud, 1991). Yang

menarik adalah hasilnya menunjukkan gambaran sbb.

Para pengajar sejarah cenderung menghindari dari kemungkinan membahas isu kontroversial yang diajukan mahasiswa. Ternyata hanya 18% saja yang *siap untuk melayani* mahasiswa yang mengajukan isu yang berkembang dalam masyarakat, sementara sebagian besar (yaitu 65%) *hanya menanggapi selintas* (Abu Su`ud, 1993). Dapat diduga kecenderungan itu terjadi karena faktor “relevansi sosial budaya” yang terjadi dalam masyarakat, yang cenderung memberikan kepada warganya suatu “*design for living*”, dan yang sekaligus merupakan akibat dari proses “*social determinism*” atau “*cultural determinism*”. Artinya, bahwa dalam menentukan sikap atau pendapat, para mahasiswa maupun pengajar sejarah, tidak begitu bergairah untuk mengajukan atau menanggapi isu sosial (apalagi yang kontroversial) dalam kelas sejarah. Terkesan mahasiswa menjadi takut melakukannya. Ini menandakan gejala rendahnya kemandirian.

Sementara itu sebenarnya para pengajar bisa mengambil dan mengangkat berbagai keadaan dan peristiwa sosial budaya yang ada dilingkungan di mana peserta didik itu tinggal, mengalami, dan bahkan merasakannya, sehingga materi pengajaran IPS bagi peserta didik tidak sebagai sesuatu yang abstrak imajiner-dan jauh dari apa yang dilihat dan

dialaminya (Suprayogi, 2007). Fakta itu sebagai akibat tekanan relevansi sosial budaya di masa Orde Baru yang menekankan perlunya azas ‘Serasi, seimbang, dan selaras’ dan cenderung menghindari perbedaan pendapat.

Atas dasar berbagai informasi tersebut di muka dipandang perlu untuk dilakukan kajian tentang **Penggunaan isu kontroversial dalam kelas sejarah di era reformasi.**

Diasumsikan para pengajar akan mengalami perubahan dalam kecenderungan mereka dalam menerima “tawaran” menggunakan isu kontroversial dalam proses pembelajaran sejarah kalau dilakukan di era reformasi seperti sekarang ini. Selama ini kita sudah memasuki tahun ke sepuluh dalam era reformasi yang telah bergulir sejak kejatuhan rezim Suharto pada awal 1998. Sehingga dimungkinkan telah terjadi proses pembebasan dari tekanan relevansi sosial budaya Orde Baru.

## **Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam studi ini difokuskan pada: (1) Bagaimana kepedulian para pengajar sejarah terhadap isu kontroversial yang berkembang dalam masyarakat yang berkaitan dengan berbagai peristiwa sejarah maupun sosial lainnya? (2) Bagaimana kecenderungan para pengajar sejarah dalam penggunaan isu

kontroversial dalam kelas sejarah? (3) Bagaimana resiko (untung dan rugi) penggunaan isu kontroversial dalam kelas sejarah menurut para pengajar sejarah?

### **Tujuan Penelitian**

Studi ini bertujuan untuk mengetahui berbagai hal, khususnya mengenai: (1) Kepedulian para pengajar sejarah terhadap isu kontroversial yang berkembang dalam masyarakat yang berkaitan dengan berbagai peristiwa sejarah maupun sosial lainnya. (2) Kecenderungan para pengajar sejarah dalam penggunaan isu kontroversial dalam kelas sejarah. (3) Resiko (untung dan rugi) penggunaan isu kontroversial dalam kelas sejarah menurut para pengajar sejarah.

### **Manfaat Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam upaya penerapan gagasan isu kontroversial masuk kelas sejarah agar pembelajaran sejarah menjadi lebih menarik dan efektif. Diharapkan kajian ini akan memberi manfaat dalam bidang pembelajaran sejarah khususnya dan IPS pada umumnya, termasuk dalam perkuliahan PKN. Ssecara rinci dapat

dibagi ke dalam dua dimensi, yaitu dimensi akademik maupun teoritik sebagaimana tersebut di bawah iuni.

### **Dimensi Akademik**

(1) Membangun kesadaran tentang perlunya inovasi dalam pembelajaran sejarah yang lebih bermakna.

(2) Menyiapkan model 'Isu kontroversial masuk kelas PKN/sejarah' yang sesuai dengan semangat reformasi yang menghormati perbedaan pendapat.

(3) Menemukan kendala dalam pelaksanaan gagasan inovasi dalam model 'Isu kontroversial masuk kelas Sejarah' agar bisa digunakan untuk menyempurnakan model pembelajaran terkait.

(4) Membuka alternatif yang kreatif dalam pelaksanaan pembelajaran sejarah

### **Dimensi teoritik**

(1) Memberi informasi tentang ada atau tidaknya hubungan antara kondisi sosial politik dengan kecenderungan para pengajar sejarah dalam menggunakan isu kontroversial masuk kelas sejarah sebagai 'tekanan relevansi sosial budaya'.

(2) Memberi informasi mengenai pendapat para guru sejarah dengan kebijakan pemerintah dalam menentukan kurikulum IPS maupun sejarah.

## Tinjauan Teoritik

### Paradigma Sejarah

Paling tidak ada dua pengertian yang bisa dikemukakan mengenai sejarah. Pertama, sejarah dianggap sebagai keseluruhan kejadian yang dialami oleh umat manusia di masa lampau. Kedua, sejarah dianggap sebagai catatan atau rekaman kejadian-kejadian itu sendiri (Daniels, 1966 : 3). Dengan adanya catatan maupun rekaman itu sejarah dapat dikomunikasikan dari generasi ke generasi lain, yang kemudian dikenal sebagai bagian dari proses pendidikan. Dengan batasan pertama, sejarah dianggap sebagai kumpulan fakta atau *history as a fact*, dalam artian kejadian obyektif tentang sesuatu yang betul-betul terjadi. Yang kedua, sejarah dianggap sebagai memori tentang masa lampau, sebagaimana dialami atau didengar oleh seseorang secara subyektif, yang kemudian disebut sebagai *history as written*.

Oleh karenanya, melupakan sejarah berarti bangsa itu seolah-olah menderita amnesia, sehingga perilaku sosial berikutnya menjadi tidak utuh, karena tidak didasarkan atas pengalaman masa lampaunya. Tepat sekali kalau Bung Karno pernah menyampaikan pidatonya yang terkenal dengan judul

*Jasmerah*, atau “Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah”.

Meskipun jalan sejarah itu unik dan hanya sekali saja terjadi, namun pengalaman menunjukkan bahwa sejarah *dapat* mengajarkan sesuatu kepada umat manusia. Seorang filsof Yunani kuno, Heraklitos, pernah mengatakan, bahwa “kalian tidak dapat menginjak untuk kedua kalinya aliran sungai yang sama, lantaran aliran sungai yang baru akan selalu mengalir kaki kalian” (Daniels, 1966: 4 - 5). Demikian pula sejarah itu sendiri terus berlalu, namun dia meninggalkan pelajaran bagi bangsa-bangsa berikutnya. Itu pula sebabnya Herodotus, filsuf sejarah terkenal dari Yunani kuno berujar, bahwa sejarah itu guru kehidupan. “*Historia vitae magistra*”, katanya.

Sementara itu, tanggapan warga masyarakat terhadap fakta sejarah maupun cerita sejarah tidak selamanya sama, sehingga menimbulkan berbagai versi. Tidak jarang komentar maupun pandangan orang-orang itu disampaikan dengan cara-cara yang merangsang, bahkan menimbulkan pertentangan pendapat atau kontroversial, yang pada gilirannya memancing pendapat yang berkepanjangan. Misalnya mengenai siapa ‘*penggali Pancasila*’, ‘*Siapa pencetus rencana Serangan Umum 1 Maret*’, ‘*Dimana naskah asli Super Semar*’. Media massa, cetak maupun elektronik, telah menyajikan isu-isu kontroversial itu, sehingga materi

sejarah bukan lagi hanya menjadi urusan para sejarawan, melainkan juga bagi masyarakat awam, politisi, maupun para pengajar sejarah. Salah satu kemungkinan yang terjadi adalah munculnya sikap yang bervariasi dari para pengajar sejarah. Kajian ini dimaksud untuk melihat secara empirik mengenai kemungkinan perbedaan di antara para pengajar sejarah mengenai dimasukkannya isu kontroversial sebagai bagian dari proses belajar mengajar sejarah.

### Fungsi-fungsi Sejarah

Kita mengenal adanya beberapa jenis fungsi sejarah bagi kehidupan umat manusia. *Pertama*, sejarah berfungsi sebagai *genesis*, oleh karenanya bersifat deskriptif, naratif, dan informatif. Dalam hal ini sejarah berisi rangkaian fakta yang dianggap menarik untuk dikisahkan dari generasi ke generasi. Sejarah hanya berisi hal-hal mengenai faktor-faktor *What, Who, When, Where* dan *How*. Sejarah dengan demikian lebih merupakan hasil karya sastra ataupun rumusan gagasan falsafi, sehingga dikenal sebagai *history as art* ataupun *humaniora*. Sementara itu faktor *Why* sama sekali tidak dibicarakan, padahal sangat berguna untuk **memberi penjelasan** tentang sesuatu peristiwa. Itu sebabnya Jurusan Sejarah dalam Universitas-Universitas dimasukkan ke dalam Fakultas Sastra, Budaya atau Filsafat, misalnya. Para pengajar di

sekolah-sekolah dasar maupun menengah menjadi sasaran para pengajar sejarah dalam menyampaikan mata pelajaran. Selama ini tidak ada masalah yang dihadapi oleh para pengajar, karena tugas mereka hanyalah **menyampaikan** yang tertuang dalam bahan ajar yang ditentukan dalam kurikulum.

*Kedua*, sejarah berfungsi *didaktis*, oleh karena itu dipilihlah fakta di sekitar pengalaman masa lampau yang membanggakan, menyedihkan dan sebagainya, yang dikomunikasikan kepada generasi muda untuk tujuan mengobarkan semangat. Berbagai nilai luhur (ideal) bangsa ingin disampaikan lewat pendidikan sejarah, agar terjadi proses sosialisasi dalam generasi baru, untuk menumbuhkan semangat kepahlawanan, patriotisme, nasionalisme dan sebagainya. Dalam fungsi semacam inilah sejarah dianggap sebagai bagian dari Ilmu Pengetahuan Sosial, yang dalam konteks persekolahan disebut Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), terutama dalam mata pelajaran PKN. Dengan alasan itu pulalah barangkali Jurusan Sejarah di IKIP dimasukkan ke dalam Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS). Dalam lembaga ini para calon pengajar sejarah di sekolah disiapkan. Kepada mereka sejarah disampaikan dalam fungsinya sebagai fungsi didaktis, sehingga tidak dikondisikan kemungkinan adanya kontroversi materi

sejarah yang mereka terima dari pengajar.

**Ketiga**, sementara itu *aliran Sejarah Baru* (New Historicism) amat menekankan pada perlunya sajian fakta sejarah secara lebih objektif, lugas atau apa adanya. Sejarah, oleh karenanya harus tidak usah dikaitkan dengan usaha mendidik (didaktis) untuk membangkitkan semangat kepahlawanan dan sebagainya, pada generasi baru. Sejarah oleh karenanya harus disusun atas dasar fakta yang sesungguhnya terjadi, sehingga diperlukan proses studi sejarah kritis. Hasilnya disajikan dalam wujud sejarah sebagai *karya Ilmu* (*history as science*) dalam bentuk *buku sejarah* (*history as written*).

Belakangan semangat New Historicism tak ayal masuk ke dalam ruang-ruang kuliah di kedua lembaga pendidikan tinggi dalam ilmu sejarah seperti tersebut di atas. Sebagai akibatnya tidak mengejutkan kalau para pengajar sejarah di sana mulai terbiasa dengan kemungkinan masuknya isu kontroversial dalam kelas sejarah. Lebih-lebih ketika dinamika sejarah telah membawa kita ke dalam era reformasi yang telah memasuki tahun kesepuluh.

## Identifikasi Tujuan Pendidikan Sejarah

Paling tidak ada tiga jenis paradigma

tujuan pendidikan sejarah, yang satu persatu akan diuraikan berikut ini.

### 1) Paradigma Tujuan Pendidikan Nasional

Berbagai tujuan pendidikan nasional pada berbagai negara secara teoritik dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, sesuai dengan paradigma pendidikan yang dikembangkan. Di negeri-negeri sedang berkembang, seperti di Indonesia, pendidikan dipandang sebagai *a process of cultural transmission*, di mana pendidikan dimaksudkan untuk menyampaikan dan melestarikan *kebudayaan* yang telah dianggap mapan (Taba, 1962 : 19).

Konsep tentang *pelestarian nilai-nilai perjuangan 1945*, misalnya, merupakan salah satu bukti dipergunakannya sistem pendidikan yang demikian itu (Abu Su'ud, 1986 :10). Orientasi pengajaran sejarah yang dianut oleh negeri-negeri yang baru mencapai kemerdekaan, amat menekankan pada bentuk sejarah nasional (Ballard ,1970 : 37).

Sementara itu, di negeri-negeri bersistem komunis atau sosialis dikembangkan prinsip bahwa pendidikan merupakan *a process of cultural transformation*, atau proses untuk mengubah warga masyarakat *menjadi tenaga kerja* yang amat diperlukan oleh lapangan pekerjaan atau industri (Taba, 1962:19). Oleh karena itu pengajaran sejarah harus diarahkan pada penanaman pengertian

mengenai benarnya prinsip perjuangan kelas, yang mendasarkan pada azas *historis materislisme* atau dialektika sejarah yang dianut oleh mereka (Ballard, 1970 : 39).

Di negeri-negeri Eropa Barat dan Amerika, yang menganut sistem sosial yang liberal, berkembang sistem pendidikan yang menganggap pendidikan sebagai *a process of self-actualization*, karena setiap individu dipandang sebagai individu yang unik (Taba, 1962 :19). Oleh karena itu pengajaran sejarah di sekolah harus dikembangkan untuk dua hal, yaitu kebanggaan nasional dan pengembangan saling pengertian antar bangsa (Ballard, 1970 : 40).

## **2) Kesesusian dengan Sistem Pendidikan Nasional**

Apabila kita simak, bunyi Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 dulu tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab II, PssaI 4 mengandung butir-butir penting, yang antara lain : 1) mencerdaskan kehidupan bangsa, 2) mengembangkan konsep manusia Indonesia seutuhnya, seperti religius, berbudi pekerti luhur, cakap, sehat, berpengetahuan, dan 3) sadar akan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan bangsa.

Dari sana terlihat betapa Sistem Pendidikan Nasional kita tidak hanya menekankan pengertian pendidikan pada fungsi *a process of cultural*

*transmission*, melainkan sekaligus merupakan *a process of cultural transformation* dan *a process of iseil-actualization*. Dengan demikian maka Model pengajaran sejarah di Indonesia harus selalu mengacu pada seperangkat rujukan yang sesuai dengan (1) falsafah Pancasila; (2) ketakwaan kepada Tuhan YME, budi pekerti, semangat kebangsaan, cinta tanah air, yang sesuai dengan fungsi *cultural transmission*; (3) dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan, yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsanya, sesuai dengan fungsi *cultural transformation*; (4) meningkatkan kecerdasan dan ketrampilan, sesuai dengan fungsi *self-actualization*; serta (5) mengembangkan saling pengertian antar bangsa, seperti bunyi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea terakhir “...dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

## **3) Tujuan pendidikan Sejarah di Sekolah**

Dalam Kurikulum 1964 dan 1968 pengajaran sejarah lebih memberikan peluang bagi pengembangan rasa kebangsaan. Dalam Kurikulum 1964, misalnya, tujuan yang demikian itu terlihat jelas pada semua jenjang pendidikan. Hal itu terjadi karena pelajaran sejarah berstatus



sebagai bagian dari Pendidikan Kewarganegaraan (Civics, PKN). Keadaam semacam itu masih dirasakan dalam Kurikulum 1968, lebih-lebih ketika pemerintah Orde Baru mulai mengembangkan program Pendidikan Kewarganagaraan, menyusul terjadinya pemberontakan G30 S/PKI pada 1965. Rumusan tujuan seperti “Menghayatkan kepada pelajar riwayat perjuangan Bangsa Indonesia dengan segala hambatannya (feodalisme, kolonialisme) untuk mencapai perikehidupan yang bebas, bahagia, adil dan makmur” menjadi ciri utama tujuan pendidikan sejarah pada awal Orde Baru itu (Hasan 1990 : 72)

Sementara itu tujuan pengajaran yang mengarah pada pengembangan kognitif telah muncul pula pada Kurikulum 1968 itu. Misalnya, Kurikulum SMA menyebutkan bahwa Pendidikan Sejarah bertujuan “untuk menanamkan *historis inzicht* kepada anak didik, agar mereka mengetahui segala peristiwa dalam hubungan sejarah, yang merupakan suatu proses sebab-akibat yang berkelanjutan”. Dalam Kurikulum 1975 misi Pendidikan Sejarah sebagai sarana pengembangan kognitif, amat menonjol. Hal itu dirasakan sekali ketika status Pendidikan Sejarah dianggap sebagai bagian dari Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) (Hasan, 1990 : 73).

Dalam Kurikulum 1986 kedua tujuan tersebut, *kognitif* dan *afektif*,

sudah digabungkan dalam Pendidikan Sejarah. Fungsi sebagai pendidikan nilai dari sejarah lebih-lebih terasa dengan munculnya mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB), yang secara khusus dimaksudkan sebagai sarana untuk mengembangkan jiwa dan semangat nilai-nilai 1945, yaitu patriotisme, kepahlawanan, rela berkorban maupun nasionslisme (Abu Su'ud, 1990 : 93).

Sejarah di sini dipelajari sebagai sejarah normatif. Di samping itu tetap diajarkan mata pelajaran sejarah yang lebih menekankan pada pengembangan kognisi dan intelektual siswa. Di sini sejarah dipelajari sebagai sejarah empirik.

Sampai di sini muncullah kemudian sejumlah masalah dalam dunia pengajaran sejarah, karena para guru sejarah harus melakukan sejumlah penyesuaian dengan tugas-tugas profesional mereka. Masalah itu bermula dari pengertian konseptual mengenai peranan sejarah dalam kehidupan manusia, potensi sejarah dalam dunia pendidikan dan pengajaran ataupun bagaimana sejarah diajarkan. Sudah barang tentu masalahnya dapat berkembang ke arah perbincangan mengenai peranan PSPB, karena meskipun GBHN masih menganggap perlu peranan PSPB dalam proses pendidikan, pengalaman menunjukkan terjadinya kejenuhan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah.

Tujuan Pendidikan Nasional Indonesia, baik menurut GBHN 1983 maupun GBHN 1988, sama-sama memandang perlu pengembangan pendidikan sejarah perjuangan bangsa, dalam rangka meneruskan dan mengembangkan jiwa, semangat, dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda. Kalau kita perhatikan maka dalam kedua konsep tersebut tidak ditulis dengan huruf besar (=PSPB). Ini berarti bahwa misi itu tidak harus dilaksanakan dalam satuan program yang eksplisit, seperti pelajaran PSPB dalam kurikulum sekolah. Itu pula yang menjadi sikap para perumus kurikulum baru yang akan segera diberlakukan pada tahun 1994. Di sana tidak dipisahkan lagi fungsi untuk pengembangan watak bangsa lewat PSPB, dan fungsi pengembangan intelektual lewat pengajaran sejarah sebagai bidang studi.

### **Meningkatkan Efektivitas Metode Mengajar Sejarah**

Beberapa hal yang kiranya perlu dikemukakan sebagai landasan pemikiran untuk meningkatkan gairah belajar sejarah adalah sbb.

### **Kepedulian Sosial**

Salah satu tujuan pengajaran sejarah sebagai bagian dari IPS adalah untuk menyiapkan generasi muda menjadi warga negara yang baik, serta berpikir kritis, yang antara lain terlihat pada adanya kepedulian sosial. Dalam

kaitan ini dapat terlihat pada kecenderungan tanggapan mereka terhadap berbagai isu kontroversial dalam masyarakat; seperti tulisan tentang Amandemen UUD 1045, Pilpres, Pilgub maupun Pilkada langsung, calon independen pada setiap pilkada, pengangkatan mantan presiden Suharto sebagai pahlawan nasional, lepasnya beberapa pulau di perbatasan dengan Malaysia, lepasnya Timtim dari NKRI, hak pilih untuk TNI maupun Polisi, dan lain sebagainya. Demikian pula dengan isu-isu internasional seperti penyerbuan militer ke Irak maupun Afganistan yang negara merdeka dan berdaulat oleh pasukan Amerika Serikat dan sekutunya atas kebijakan presiden G.W. Bush, pelarangan begara-negara Iran maupun Korea Utara sebagai negara nuklir oleh PBB, penarikan mundur semua tentara asing dari negara merdeka dan berdaulat.

### **Proses Pendemokrasian**

Secara teoritik kerangka pemikiran itu didasarkan atas anggapan dasar, bahwa demokrasi merupakan cara hidup yang menghargai alternatif, yang berarti warga masyarakat mempunyai kebebasan untuk berbicara, berkumpul, mengajar dan sebagainya. Tanpa adanya kebebasan itu rakyat tidak mempunyai kesempatan untuk memerintah atau melaksanakan kedaulatan rakyat. Dalam lembaga sekolah para siswa yang dididik untuk menjadi warga negara

yang baik dan bertanggung jawab, mempunyai peluang untuk berlatih mengembangkan jiwa demokrasi itu dengan menyatakan pendapat, meskipun berbeda dengan pendapat orang lain. Misalnya terhadap berbagai *isu sosial yang bersifat kontroversial*. Sekolah ternyata mempunyai fasilitas untuk memberikan pengalaman kepada para siswa/mahasiswa untuk mengembangkan pengetahuan kognitif, emosi, serta ketrampilan yang berkaitan dengan hak masyarakat demokratis (Hartshorn dan Nu'man Somantri, 1971:49). Yang menjadi dasar konsep tersebut adalah kenyataan bahwa setiap bangsa, setiap warga masyarakat akan dihadapkan pada banyak isu dan masalah, yang menimbulkan perbedaan pendapat adanya kepedulian sosial. Dalam kaitan dengan kegiatan belajar mengajar sejarah hal tersebut dapat terlihat pada kecenderungan tanggapan mereka terhadap berbagai isu kontroversial dalam masyarakat, seperti isu-isu yang disiarkan dalam media massa.

### **Relevansi Sosial Budaya**

Secara konseptual dapat difahami, bahwa kecenderungan tanggapan maupun sikap seseorang terhadap sesuatu isu atau objek, merupakan bagian dari pemeranan atau penampilan seseorang dalam posisi sosial mereka. Sikap atau tanggapan itu tidak bisa dilepaskan dari lingkungan

sosial mereka. Pola tingkah laku yang telah menyatu dalam masyarakat itu dalam sosiologi dikenal sebagai *design for living* bagi warganya. Gejala semacam itu membuktikan kebenaran dari konsep *cultural determinism*, menurut para antropolog, seperti Herskovits maupun Malinowski, atau *social determinism* menurut para sosiolog (Abu Su'ud, 1986,170-171).

Dalam masyarakat yang mengenal sistem demokrasi yang mengandalkan musyawarah untuk mufakat, sebagaimana difahami masyarakat pada tahapan pembangunan sekarang, pengajar maupun mahasiswa sejarah di Jawa Tengah, sebagai bagian dari masyarakat Jawa Tengah pada umumnya. Menurut pendapat Kuntjaraningrat (1984) manusia cenderung bertingkah laku lebih mengutamakan keselarasan dengan lingkungan alam maupun sosial. Dikhawatirkan mereka cenderung tidak tertarik untuk mengajukan isu kontroversial dalam kelas sejarah. Terasa sekali, bahwa ungkapan musyawarah untuk mufakat cenderung difahami sebagai keharusan untuk selalu konform dengan pendapat umum. Sehingga ungkapan keterbukaan yang amat dianjurkan oleh pemerintah, hanya dirasakan sebagai slogan melulu, yang menandakan masih rendahnya kemandirian (otonomi) pada sebagian anggota masyarakat dalam menyatakan pendapat di masa Orde Baru..

Kesimpulan semacam itu tentu saja sangat hipotetis sifatnya. Bagaimana kenyataan yang terjadi dapat kita lihat pada hasil studi berikut.

## **Kajian Empirik**

### **Subyek penelitian**

Dalam penelitian ini data diambil dari para pengajar sejarah dari dua jenis lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan sejarah siii Kota Semarang. Di Perguruan Tinggi sejarah diajarkan dalam status sebagai bagian dari IPS, dan di SMA bidang studi sejarah diajarkan sebagai bagian dari IPS. Dari Perguruan Tinggi hanya ada Jurusan Sejarah pada Fakultas Sastra Undip dan Jurusan Sejarah pada Fakultas Ilmu Sosial Unnes, sementara dari SMA diambil semua guru sejarah dari semua SMA Negeri yang ada di kota Semarang, sebanyak 16 buah. Mereka tidak mewakili pengajar sejarah yang lain pada lembaga lain maupun dari daerah lain, baik yang berstatus lembaga negeri maupun swasta, sehingga para responden itu bukanlah merupakan satuan sampel dari sebuah komunitas yang lebih luas. Oleh karenanya hasil kajian ini tidak dimaksudkan untuk menarik kesimpulan tentang kondisi dari komunitas yang lebih luas. Kecuali itu hasil kajian ini tidak juga bisa digunakan untuk menggeneralisasikan hasil kajian. Kajian

ini semata-mata sebuah kajian surve tentang kinerja maupun pendapat pengajar sejarah dari dua Perguruan Tinggi Negeri dan SMA Negeri di Semarang. Meskipun demikian dari informasi awal ini bisa dirancang kajian yang lebih fungsional dengan mengambil data yang lebih luas agar bisa dilakukan generalisasi.

### **Alat pengambilan data**

Data diambil dengan kuesioner yang harus diisi oleh para pengajar sejarah sebagai responden, yang jumlahnya belum bisa dipastikan sebelumnya. Demikian juga dengan jumlah responden dari pengajar sejarah pada tingkat PT belum bisa dipastikan, meskipun seluruh dosen sejarah yang ada berjumlah 52 orang, yang masing-masing berjumlah 26 orang dosen pada masing-masing PT yang menjadi lokasi penelitian. Dalam kenyataan yang mengembalikan kuesioner/angket adalah sebanyak 21 orang responden dari 26 jumlah dosen yang ada di Jurusan Sejarah FIS Unnes, 10 orang responden dari 26 orang dosen sejarah dari 26 jumlah dosen pada Jurusan Sejarah FS Undip, dan 25 responden dari 27 jumlah pengajar sejarah pada 16 SMA yang ada di kota Semarang. Instrumen berupa kuesioner itu berisi berbagai aspek permasalahan yang terdiri dari 13 butir pertanyaan. Jawaban atau tanggapan atas masing-masing butir pertanyaan itu disusun menjadi 13 buah tabel yang

menunjukkan arah kecenderungan yang dibutuhkan yang masing-masing diberi judul :

Tabel 1. Tingkat kerangsangan pada media **cetak**

Tabel 2. Tingkat kerangsangan pada media **tv**

Tabel 3. Tngkat kerangsangan pada media **radio**

Tabel 4. Tingkat kerangsangan pada media **internet**

Tabel 5. Respon terhadap isu kontroversial

Tabel 6. Rrespon terhadap isu kontroversial

Tabel 7. Rspn terhadap pelarangan buku sejarah yang tidak memuat keterlibatan PKI dalam Peristiwa September 1965

Tabel 8. Respon pada pertanyaan siswa/mahasiswa terkait isu kontroversial

Tabel 9. Kecenderungan **tidak menggunakan** isu kontroversial dalam kelas

Tabel 10. Kecenderungan **menggunakan** isu kontro dalam kelas

Tabel 11. Frekuensi gunakan isu kontro

Tabel 12. Pendapat ttg **manfaat** gunakan isu kontro dalam kelas

Tabel 13. Pendapat tentang **mudarat** gunakan isu kontroversial dalam kelas

## Analisis data

Analisis data dilakukan secara proporsional (kuantitatif prosential)

untuk mengetahui kecenderungan yang ada. Makin besar angka prosentase menunjukkan makin besar kecenderungan yang ada.

## Penutup

### Hasil kajian dan simpulan

Dari data yang terbaca pada daftar hasil kajian dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut.

Bahwa kepedulian para pengajar sejarah terhadap isu kontroversial yang berkembang dalam masyarakat yang berkaitan dengan berbagai peristiwa sejarah maupun sosial lainnya **cukup tinggi** dengan rincian berikut.

- 1) Tingkat kerangsangan pada media massa **sebagian terbesar (75%)** dari pengajar sejarah, baik di PT maupun SMA, secara *rutin setiap hari, membaca media cetak*
- 2) Agak mengherankan kalau pengajar IPS/Sejarah ada yang tidak akrab dengan media massa yang merupakan media untuk melihat perkembangan dunia.
- 3) Barangkali bagi pengajar SMA kondisi itu masih bisa dimaklumi, kerana tidak menghadapi tantangan seperti dihadapi para dosen di PT menghadapi mahasiswa yang kritis.

- 4) Bagaimanapun nampaknya sebagai guru IPS/ejarah mereka memiliki potensi menjadi pengajar yang **well-informed** mengenai perkembangan dunia.

Bahwa respon terhadap isu kontroversial yang berkembang dalam media massa **cukup tinggi**, yang terinci sbb.

- 1) Respon terhadap isu kontroversial **bagian terbesar** (69%) dari pengajar sejarah *menaruh perhatian penuh dan mengikuti kelanjutannya*.

Bahwa respon terhadap isu kontroversial maupun gairah mendiskusikannya **masih rendah**.

- 1) Respon terhadap isu kontroversial sebagian besar cenderung *hanya ngobrol-ngobrol dengan sejawat*. Bandingkan Unnes 39%, Undip 73%. SMA 88%.
- 2) Di era reformasi ini nampaknya kegairahan untuk melakukan diskusi atau membahas terbuka tentang isu kontroversial **masih rendah**.

Bahwa respon terhadap pelarangan buku sejarah yang tidak memuat keterlibatan PKI dalam peristiwa September 1965 **berimbang**.

- 1) Sebanyak 67% menyatakan *tidak setuju* atas pelarangan itu. Sisanya yang 31% menyatakan *setuju* atas pelarangan itu.
- 2) Mereka menyarankan agar pengajar *bisa lebih kritis*, meski ada atau tidak ada larangan.
- 3) Mereka juga beranggapan agar para dosen sejarah lebih mendasarkan pada *sikap keterbukaan* di era reformasi.

Bahwa kecenderungan alasan menggunakan atau tidak menggunakan isu kontroversial dalam kelas sejarah **cukup bervariasi dan positif**.

- 1) Alasan mereka **tidak menggunakan** isu kontroversial dalam kelas diperoleh urutan alasan sbb. karena akan *mengurangi waktu* (41%); karena *tak relevan* (35%); karena *tak merasa perlu* (18%); dan karena hanya akan *mempersulit diri* (6%).
- 2) Alasan mereka **menggunakan** isu kontroversial dalam kelas karena alasan *topiknya aktual* (34%); *menarik* (34%); *relevan* (30%); dan *sudah terbiasa* (2%).

Bahwa **risiko** penggunaan isu kontroversial dalam kelas dikaitkan dengan manfaat maupun mudarat (kelemahannya)

- 1) **Manfaat** penggunaan isu kontroversial dalam kelas adalah karena pembelajaran menjadi *lebih kontekstual* (33%); lebih berpotensi meningkatkan *partisipasi siswa* (19%); pembahasan berpotensi *lebih menarik, tidak jenuh* (17%); lebih berpotensi *pengembangkan semangat toleransi dan saling pengertian* (16%); lebih berpotensi *mengembangkan dialog* (15%).
- 2) **Mudarat** penggunaan isu kontroversial dalam kelas menurut mereka adalah karena *bisa bahan kuliah/pelajaran tidak selesai dibahas* (29%), *memerlukan pengajar yang gemar mengikuti dialog terbuka* (24%), *tidak semua warga kelas tertarik* (22%), *memerlukan kesabaran dan kebijaksanaan pengajar* (19%), dan *selebihnya memberi jawaban lain-* (6%).
- 1) Diperlukan **proses penyadaran** akan fungsi media massa bagi pengajar sejarah untuk kepentingan pengembangan proses pembelajaran.
- 2) Diperlukan proses peningkatan **semangat keterbukaan** bagi pengajar sejarah yang sesuai dengan era reformasi.
- 3) Diperlukan **kajian lebih spesifik** mengenai manfaat media massa bagi proses pembelajaran sejarah yang berkembang di era reformasi.
- 4) Diperlukan proses untuk meningkatkan **kesadaran akan perlunya penggunaan isu kontroversial** dalam proses pembelajaran sejarah sebagai bagian dari tujuan pendidikan sejarah untuk menyiapkan eserta didik menjadi warga negara yang baik dan meningkatkan wawasan demokrasi dan toleransi.
- 5) Diperlukan **kajian serupa** pada daerah penelitian yang lain untuk mendapatkan informasi pembanding.

## Saran

Sesuai dengan simpulan yang telah ditarik tersebut di atas dapat dikemukakan sejumlah saran yang terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

- Baar, Robert, James L. Barth, dan S. Samuel Shemis. 1978/1986. *The Nature of the Social Studies*.

- Palm Spring, CA.: ECT Publication
- Ballard, Martin (ed). 1970. *New Movement in the Study and Teaching History*, London : Temple Smith.
- Banks, J.A. 1985. *Teaching Strategies for the Social Studies*. New York: Longman.
- Daniels, Robert V. 1966. *Studying History*, New Jersey: Prance Hall
- Hartshorn, Merrill F dan Nu'man Somantri. 1971. *Tantangan Dalam Pengajaran Ilmu Sosial dan Pendidikan Kewargaan Negara*, Bandung: Badan Penerbitan IKIP Bandung.
- Sudarno dkk. 1998. *Pendidikan Ilmu Sosial*, Unnes Press, Semarang.
- Suprayogi dkk. 2007. *Pendidikan Ilmu Sosial*, Unnes Press, Semarang.
- Su'ud, Abu. 1991. **Pemeranan Pengajar Sejarah Pada beberapa Perguruan Tinggi Di Jawa Tengah Dalam Menanggapi Isu Kontroversial**, Laporan Penelitian, Pusat Penelitian IKIP Semarang.
- Su'ud, Abu. 1999. *Model Pengajaran Sejarah Yang Sesuai Dengan Perkembangan Sosial*, dalam Seminar Pengajaran Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Rangka Dies Natalis IKIP ke 26, IKIP Semarang.
- Taba, Hilda. 1962. *Curriculum Development Theory and Practice*, Chicago, New York : Harcourt, Brace World, Inc
- \_\_\_\_\_. 1986a. *Kurikulum Sekolah Menengah Atas. GBPP Mata Pelajaran Sejarah Budaya*, Jakarta: Balitbang, Dep. P & K.
- \_\_\_\_\_. 1994/1995. *Kurikulum Pendidikan Dasar: GBPP Kelas III-VI Sekolah Dasar*. Jakarta: P3GSD, Dirjen DIKDASMEN, 2003. *Kurikulum 2004, Pedoman Khusus Pengembangan Silabus Berbasis Kompetensi*, Sekolah Menengah Pertama.
- \_\_\_\_\_. *Kurikulum 2004. Pedoman Khusus Pengembangan Sistem penilaian Berbasis Kompetensi*, Sekolah Menengah Pertama Depdiknas, Ditjen dikdasmen, Dir PLP, 2005, *Penilaian Pembelajaran Pengetahuan Sosial*, Jakarta, Dir. PLP
- \*) **Prof. Dr. Abu Su'ud, Dosen FPIPS IKIP PGRI Semarang**